

**PENGARUH KEBIJAKAN PELAYANAN GIZI
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PASIEN DI RUMAH SAKIT
DI KOTA SEMARANG**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh

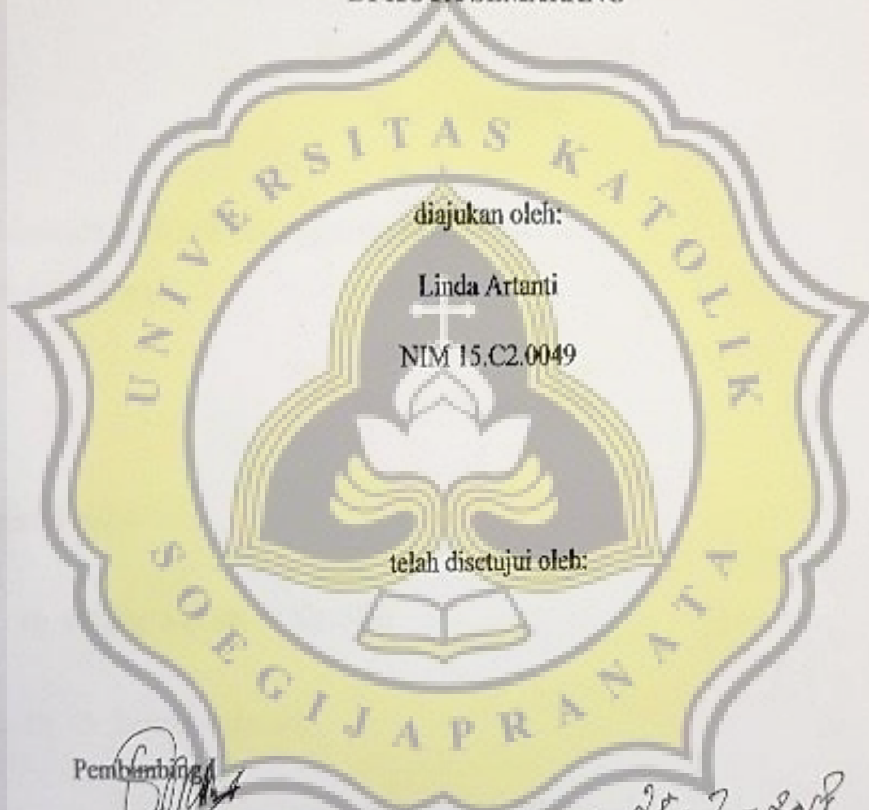
LINDA ARTANTI

NIM 15.C2.0049

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2018

TESIS
PENGARUH KEBIJAKAN PELAYANAN GIZI
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PASIEN DI RUMAH SAKIT
DI KOTA SEMARANG




diajukan oleh:

Linda Artanti

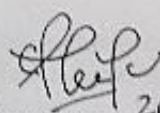
NIM 15.C2.0049

telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Dr. Endang Wahyati Y., SH., MH.

tanggal..... 28-7-2018

Pembimbing II
Dr. Ch. Retnaningsih, MP.


tanggal..... 26-7-2018

**FAKULTAS PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN**
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 ,8505003(hunting) Fax.(024) 8415429 - 8445265
e-mail:mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : LINDA ARTANTI

Nim : 15.C2.0049

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Sabtu, 28 Juli 2018

Susunan Dewan Penguji

Dosen-Penguji :

1. Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH

2. Dr. Ch. Retnaningsih, MP

3. dr. Hadi Sulistyanto, SpPD., MH.Kes., FINASIM

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Sabtu, 28 Juli 2018



(Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH)

Ketua Program Studi
Magister Hukum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“Pengaruh Kebijakan Pelayanan Gizi terhadap Perlindungan Hak Pasien di Rumah Sakit di Kota Semarang”**. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa Rumah Sakit di kota Semarang, secara umum pelaksanaan kebijakan pelayanan gizi sudah terlaksana sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sejak awal. Pelaksanaan pelayanan gizi yang sesuai dengan standar kebijakan merupakan salah satu perlindungan hukum terhadap hak pasien yang dirawat di RS. Pelayanan gizi diatur dalam Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum konsentrasi Hukum Kesehatan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penulis bersyukur dalam proses pembuatan tesis ini mendapatkan banyak dukungan dan bantuan beberapa pihak. Dalam kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih atas segala dukungan dan bimbingannya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Frederik Ridwan Sanjaya, SE., S.Kom, MS., IEC, sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh Program Studi Magister Hukum Kesehatan.
2. Dr. Marcella Elwina S., SH., CN., M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

3. Dr. Endang Wahyati Yustina, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, dan sekaligus sebagai dosen pembimbing satu yang telah sabar dan setia memberikan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bpk. Ignatius Hartyo Purwanto, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Dr. Ch. Retnaningsih, MP., selaku dosen pembimbing kedua yang sangat sabar dan terus memberi semangat serta meluangkan waktunya untuk membimbing pembuatan tesis ini.
6. Dr. Hadi Sulistyanto, Sp. PD, MHKes, FINASIM, selaku dosen penguji yang banyak memberikan saran, pengalaman, dan arahan dalam pembuatan tesis.
7. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata, yang telah berbagi ilmu dan pengalaman.
8. Seluruh staf administrasi dan sekretariat Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata, terutama Bu Hermin dan Mas Dian, yang dengan sabar dan tulus membantu mengingatkan administrasi dan jadwal program, juga Pak Kasno yang membantu mempersiapkan ruangan dan peralatan untuk perkuliahan.
9. Prof. Dr. dr. Suprihati, Sp. THT-KL (K), Prof. dr. Siti Fatimah Moeis, MSc, Sp. GK (K), dan Dr. Mussynawaroh, Sp. THT-KL, serta Bu Tri atas saran dan arahnya dalam pembuatan *ethical clearance* dalam penelitian.

10. Dr. Roy Hardjalukita, Sp. PD selaku Direktur RS Columbia Asia Semarang dan dr. Siska Sindhuatmadja, MM. selaku General Manager beserta seluruh staf terutama Bu Ina selaku kepala Departemen *Food and Nutrition*, Bu April selaku Ahli Gizi Penanggung Jawab, dan seluruh tim gizi, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian.
11. Dra. Retno Sudewi, Apt., MSi., MM selaku Direktur RSUD Tugurejo Semarang beserta seluruh staf gizi terutama Bu Dwi Nur Endah selaku Ka Instalasi Gizi beserta tim gizi yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian.
12. Dr. Agus Saptanto, Sp. A selaku Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) RSUD Tugurejo, Pak Himawan selaku Sekretaris KEPK, dan Pak Spto selaku bagian diklat yang memberikan kesempatan penulis untuk mendapatkan surat ijin penelitian.
13. Dr. I Gusti Gede M. Andika, Sp. Rad, MKes selaku Direktur RS Bhayangkara Semarang beserta staf nya terutama Pak Sriyono selaku kepala diklat, Bu Novi dan Bu Yunita Dewi, serta Bu Anis selaku Ahli Gizi dan seluruh tenaga gizi yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian.
14. Dr. Daniel Budi Wibowo, MKes selaku Direktur RS Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang beserta stafnya terutama Pak Aji di bagian diklat, Bu Anik selaku Kepala Instalasi Gizi beserta seluruh tim gizi yang memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian.
15. Dedikasi tertinggi dan hormat penulis ditujukan untuk kedua orang tua tercinta, (Alm) Bpk. Sambudi Adhi Sumarto dan Ibu Tan Ping Lian atas doa, cinta kasih,

dukungan, dan kesabarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Studi Magister Hukum Kesehatan.

16. Kepada suami tersayang Eko Budiyanto yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan kesabarannya serta pengorbanannya untuk selalu mendampingi penulis selama menjalani Program Studi Magister Hukum Kesehatan.
17. Kepada anak tercinta Zipora Maureen Budiyanto yang telah penuh pengertian mendukung penulis dalam menjalani Program Studi Magister Hukum Kesehatan.
18. Henri Aristanto dan Lina Purnamasari, saudara terbaik yang selalu siap membantu dalam segala keadaan sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Studi Magister Hukum Kesehatan.
19. Kepada sahabat-sahabat dalam suka dan duka, serta rekan-rekan Angkatan 24 Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang selalu memberikan dukungan, doa, dan kritikan selama ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna. Kritik dan saran untuk perbaikan penyusunan penelitian selanjutnya sangat penulis harapkan.

Semarang, Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
HALAMAN PERNYATAAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kerangka Pemikiran.....	11
1. Kerangka Konsep.....	11
2. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Rencana Penyajian Tesis.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24

a. Pelayanan Kesehatan.....	24
b. Pelayanan Gizi.....	26
c. Upaya Kesehatan.....	29
d. Tenaga Gizi sebagai Tenaga Kesehatan.....	32
e. Rumah Sakit sebagai Fasilitas Kesehatan.....	34
f. Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan.....	40
g. Kebijakan dalam Pengaturan Organisasi.....	44
h. Peranan <i>Hospital by Laws</i> terhadap Kinerja RS.....	50
i. Perlindungan Hukum terhadap Hak Pasien.....	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. HASIL PENELITIAN.....	57
1. Gambaran Umum FasKes di Wilayah Dinas Kesehatan Kota Semarang	57
a. FasKes di Wilayah Dinas Kesehatan Kota Semarang.....	57
b. Pelayanan Gizi di RS Wilayah Kota Semarang.....	58
2. Gambaran Obyek Penelitian.....	59
a. RS Columbia Asia Semarang.....	59
1) Gambaran Umum RSCA Semarang.....	59
2) Hasil Observasi di RSCA Semarang.....	60
3) Hasil Wawancara dengan Informan.....	64
b. RSUD Tugurejo Semarang.....	68
1) Gambaran Umum RSUD Tugurejo.....	68
2) Hasil Observasi di RSUD Tugurejo.....	69
3) Hasil Wawancara dengan Informan.....	76

c. RS Bhayangkara Semarang.....	78
1) Gambaran Umum RS Bhayangkara.....	78
2) Hasil Observasi di RS Bhayangkara.....	81
3) Hasil Wawancara dengan Informan.....	88
d. RS Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang.....	89
1) Gambaran Umum RS PWDC.....	89
2) Hasil Observasi di RS PWDC.....	91
3) Hasil Wawancara dengan Informan.....	97
B. PEMBAHASAN.....	99
1. Pengaturan tentang Perlindungan Hak atas Pelayanan Gizi.....	99
a. Dasar Hukum Perlindungan Hak atas Pelayanan Gizi.....	99
b. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hak atas Pelayanan Gizi.....	104
c. Tujuan Pengaturan Perlindungan Hak atas Pelayanan Gizi.....	109
2. Pelaksanaan Perlindungan Hak atas Pelayanan Gizi.....	111
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan.....	130
BAB IV PENUTUP.....	137
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran.....	143
DAFTAR PUSTAKA.....	145
LAMPIRAN.....	154

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Teori Hendrik L. Blum.....	31
Gambar 2 RS Columbia Asia Semarang.....	60
Gambar 3 Struktur Pelayanan Gizi di RSCA Semarang.....	60
Gambar 4 RSUD Tugurejo Semarang.....	68
Gambar 5 Struktur Organisasi RSUD Tugurejo Semarang.....	69
Gambar 6 Struktur Pelayanan Gizi di RSUD Tugurejo Semarang.....	71
Gambar 7 RS Bhayangkara Tingkat II Polda Jawa Tengah.....	79
Gambar 8 Struktur Organisasi RS Bhayangkara Semarang.....	80
Gambar 9 Struktur Pelayanan Gizi di RS Bhayangkara Semarang.....	80
Gambar 10 RS Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang.....	90
Gambar 11 Struktur Organisasi RS PWDC.....	90
Gambar 12 Struktur Pelayanan Gizi RS PWDC.....	92
Gambar 13 Sistem Online Pelayanan Gizi RS PWDC.....	97

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Ethical Clearance Penelitian
- Lampiran 2 Surat Pernyataan RSUD Tugurejo
- Lampiran 3 Surat Ijin dari RS untuk Penelitian
- Lampiran 4 Surat Pengajuan Permohonan Ijin Penelitian
- Lampiran 5 Struktur Organisasi atau Pelayanan Gizi di RS
- Lampiran 6 Kebijakan Pelayanan Gizi di RS
- Lampiran 7 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Gizi
- Lampiran 8 *Informed Consent* untuk Responden
- Lampiran 9 Lembar Kuesioner Penelitian
- Lampiran 10 Lembar Kuesioner Pasien yang telah diisi
- Lampiran 11 Flyer Maklumat Pelayanan RSUD Tugurejo
- Lampiran 12 Form Plag Scan Perpustakaan



DAFTAR SINGKATAN

ATK	: Alat Tulis Kantor
BAPEN	: <i>British Association for Parenteral and Enteral Nutrition</i>
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DokPol	: Kedokteran dan Kepolisian
ESPEN	: <i>European Society of Parenteral and Enteral Nutrition</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HBL	: <i>Hospital by Laws</i>
IC	: <i>informed consent</i>
IGD	: Instalasi Gawat Darurat
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KepPres	: Keputusan Presiden
KMK	: Keputusan Menteri Kesehatan
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MRS	: Malnutrisi Rumah Sakit
MUST	: <i>Malnutrition Universal Screening Tools</i>
NBPNS	: <i>National Board of Physician Nutrition Specialists</i>
Perpu	: Peraturan Pengganti Undang-undang
PMK	: Peraturan Menteri Kesehatan
PP	: Peraturan Pemerintah
PPT	: Pusat Pelayanan Terpadu
PT	: Perseroan Terbatas
RS	: Rumah Sakit
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
SDM	: sumber daya manusia
SIKTGz	: Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
SIP	: Surat Izin Praktik
SK	: Surat Keputusan
SOP	: Standar Operasional Prosedur
Sp. GK	: Spesialis Gizi Klinis

- STR : Surat Tanda Registrasi
UGD : Unit Gawat Darurat
UU : Undang-undang
UUD : Undang-undang Dasar
WHO : *World Health Organizations*
YAKKUM : Yayasan Kesehatan Kristen Untuk Umum)



**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

Nomor : 0047/ SK.Rek/X/2013

Tanggal : 07 Oktober 2013

**Tentang : PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI, TUGAS
AKHIR, DAN TESIS**

PERNYATAAN KEASLIAN ~~SKRIPSI/ TUGAS AKHIR/~~ TESIS *)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi/ tugas akhir/ tesis *) yang berjudul:

".....PENGARUH KEBIJAKAN PELAYANAN GIZI TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK PASIEN DI RS. DI KOTA SEMARANG....."

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diaacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi/ tugas akhir/ tesis *) ini sebagian atau seluruhnya merupakan *hasil plagiasi*, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 24 Juli 2018



(.....LINDA ACANTINI.....)

NIM:.....15.02.0043.....

*) : hilangkan yang tidak sesuai

ABSTRAK

Pelayanan gizi sebagai salah satu pilar dalam pelayanan kesehatan. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan gizi yang merupakan salah satu hak asasi. Perlindungan hukum diperlukan terhadap pemenuhan hak pasien atas pelayanan gizi. Tingginya angka malnutrisi (gizi buruk dan/ atau gizi lebih) di RS menunjukkan pelayanan gizi belum terpenuhi dengan baik. Pelayanan gizi yang baik memerlukan koordinasi antara kebijakan dengan sumber daya yang ada di RS.

Tujuan penelitian ini yaitu memperoleh gambaran mengenai kebijakan pelayanan gizi di RS, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak pasien di RS, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian yang digunakan deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji kebijakan di empat RS di Kota Semarang (RSUD Tugurejo, RS Bhayangkara, RS Columbia Asia, dan RS Panti Wilasa Dr. Cipto). Analisis data menggunakan metode kualitatif.

Kesimpulan penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap hak pasien atas pelayanan gizi di RS telah terpenuhi dengan adanya kebijakan hukum yang mengaturnya. Kebijakan pelayanan gizi RS menjadi acuan bagi tenaga gizi dalam memberikan pelayanan gizi yang baik dan memberikan perlindungan hukum bagi pasien untuk mendapatkan hak atas pelayanan gizi. Dasar hukum perlindungan hukum hak pasien atas pelayanan gizi yaitu Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan. Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor yuridis (berupa kebijakan dan bentuk turunannya, jumlah SOP dan sosialisasinya), faktor sosial (berupa perilaku pasien dan/ atau keluarganya, tingkat pendidikan, komunikasi antara tenaga gizi dengan dokter), dan faktor teknis berupa jumlah tenaga gizi yang terbatas, sarana dan prasarana gizi yang tersedia.

Kata kunci: pelayanan gizi, kebijakan, SOP, malnutrisi, perlindungan hukum

ABSTRACT

Nutrition service is one of the pillars in health services. Everyone has a right to get health service which is one of the basic rights. This means that a patient's right to get nutrition service has to be guaranteed and even legally protected. Malnutrition experienced by patients in hospitals shows that the nutrition service remains bad in the hospitals. A good nutrition service requires coordination between the existing policies and the hospitals' resources.

The objectives of this study were to obtain a description of nutrition service policy in hospitals, the implementation of nutrition service policy in relation with patients' rights protection in hospitals, and to find the factors influencing the implementation of legal protection for the patients' rights in getting nutrition service in hospitals. This research applied socio-legal approach and used analytical descriptive specification. The data were gathered from four hospitals in Semarang City. The data were then qualitatively analyzed.

The results of the research showed that the legal protection of the patient's right in getting nutrition service at the hospitals had been fulfilled by the policies and the existing legislations regulating it. The existence of policy of nutrition service of the hospitals became reference for nutritionists in providing good nutrition service and legal protection for patient's right in getting the nutrition service. The legal basis of the legal protection for the patient was the Act on Health and Health Ministry Regulation. The judicial factors affecting were in the forms of policies and its derivatives, the number of Procedure Operational Standards (POSS) and socialization. The social factors affecting appeared in the form of patient's and/or family's behavior, education level, communication between nutritionists and medical doctors whereas the technical factors appeared in the form of limited nutrition, available nutrition facilities and infrastructure.

Keywords: nutrition service, policy, POSS, malnutrition, legal protection

